

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbedaan fungsi, peran, tanggung jawab serta wilayah aktivitas antara laki-laki dan perempuan diakibatkan oleh perbedaan konsep gender secara sosial dalam masyarakat. Perbedaan gender ini sudah tertanam dalam cara pandang masyarakat sehingga sulit untuk diubah (Puspitawati, 2012: 41-42).

Kaum feminisme memandang bahwa keluarga ialah salah satu sumber eksploitasi bagi perempuan. Dalam keluarga, pembagian peran terjalin secara tidak adil dan tidak *balance*. Pembagian kerja dan peran tersebut pada umumnya dilandasi oleh budaya patriarki yang memosisikan laki-laki berada di atas perempuan (Puspitawati, 2012: 47-48).

Pada masyarakat Indonesia yang menganut budaya patriarki, pembagian peran gender masih didasarkan pada jenis kelamin. Mereka masih menganggap bahwa peran suami yakni mencari nafkah sedangkan peran istri yakni mengurus rumah, dampaknya peran perempuan hanya sebatas sektor domestik saja serta tidak dapat berperan besar dalam sektor publik (bidang pekerjaan). Hal tersebut terus menerus disosialisasikan dari generasi ke generasi. Dalam hal ini, perempuan terperangkap dalam konstruksi sosial itu yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk berkontribusi di sektor publik.

Pada era modernisasi seperti saat ini, perubahan sosial terus terjadi sehingga menyebabkan pergeseran peran pada perempuan. Pada awalnya hanya

suami yang bekerja, namun karena kondisi serta situasi keluarga istri pun turut bekerja hingga mempengaruhi peran antara suami dan istri dalam keluarga (Wibowo, 2011: 356).

Daulay (2015: 271) mengungkapkan bahwa peran perempuan di masa kini mengalami pergeseran. Pesatnya gerakan-gerakan kaum feminisme turut berperan dalam membentuk pola pikir masyarakat, khususnya perempuan, terkait gender. Aktualisasi diri perempuan semakin meningkat pesat baik dibidang ekonomi, sosial, politik, budaya maupun kesehatan. Bersamaan dengan meningkatnya pendidikan perempuan, maka timbullah kesadaran akan potensi yang dimilikinya untuk dapat berkembang dan sukses (Hastuti, 2018: 28). Pertumbuhan industrialisasi di Indonesia juga ikut berdampak pada terbuka luasnya lapangan pekerjaan bagi perempuan.

Dalam hal ini, suami dan istri yang sama-sama bekerja pada sektor publik untuk mencari nafkah disebut dengan istilah *dual earner family* (keluarga berpenghasilan ganda). Beberapa literatur menggunakan istilah *dual worker family*, *dual career family* atau *dual income family* untuk menjelaskan hal yang sama (Rustham, 2019: 23). Dalam bentuk *dual earner family* menimbulkan banyak permasalahan. Stewart & Barling (dalam Rustham, 2019: 24) menyebutkan bahwa *dual earner family* dapat mempengaruhi situasi keluarga.

Adanya kontribusi perempuan dalam ranah publik menyebabkan pergeseran peran dalam keluarga. Banyak keluarga yang berpenghasilan ganda,

namun masih ada ketimpangan gender dalam pembagian perannya sehingga menyebabkan beban ganda pada perempuan. Seiring dengan adanya pergeseran budaya perempuan bekerja, wilayah domestik (rumah tangga) menjadi hal yang patut dipertimbangkan dalam pembagian perannya untuk menciptakan keharmonisan keluarga.

Studi penelitian yang dilakukan oleh Shaliha & Fadlia (2019: 6), menyatakan bahwa telah berubahnya pembagian peran dalam keluarga, di mana laki-laki dan perempuan didesak untuk bekerja sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Adanya ketimpangan dalam pembagian peran antara suami dan istri di dalam rumah tangga diakibatkan oleh kultur masyarakat itu sendiri. Pekerjaan domestik dan publik, keduanya di kerjakan oleh perempuan atau istri.

Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan adakalanya dapat dipengaruhi oleh perspektif masyarakat terkait peran gender yang cenderung memosisikan perempuan selalu pada peran domestik (rumah tangga). Rahayu (dalam Putri & Lestari, 2015: 73) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pola pembagian peran dalam keluarga, di antaranya: kebijakan pemerintah, pendidikan, nilai-nilai, budaya, media massa, dan lingkungan.

Pada kenyataannya, pembagian peran dalam keluarga cenderung tidak seimbang. Pada istri yang juga berperan pada sektor publik masih memiliki beban ganda karena pekerjaan domestik pun di kerjakan oleh istri. Suami rata-rata memiliki jam kerja harian yang dibayar lebih banyak dibandingkan dengan istri pada *dual earner family*. Istri menghabiskan lebih banyak jam harian secara

signifikan untuk pekerjaan rumah tangga dan manajemen rumah tangga dibandingkan dengan suami. Dalam pengasuhan anak, ibu menghabiskan waktu rata-rata selama 3,41 jam per hari, sedangkan suami rata-rata 2,21 jam per hari. Rata-rata alokasi waktu harian istri untuk pekerjaan rumah tangga dan manajemen rumah tangga serta pengasuhan anak yakni sekitar 1 jam 40 menit lebih lama dibandingkan dengan suami (Craig & Churchill, 2020: 7-8).

Pembagian peran yang tidak seimbang tersebut disebabkan karena budaya patriarki dalam masyarakat. Perempuan yang bekerja di sektor publik menyanggah beban peran ganda karena pekerjaan rumah tangga pun di kerjakan olehnya. Ketika perempuan bekerja, mereka dituntut harus bertanggung jawab terhadap peran rumah tangga sedangkan laki-laki tidak. Akhirnya, muncul stigma bahwa pada istri yang bekerja dianggap melalaikan tugasnya sebagai ibu dan istri. Beberapa bukti menunjukkan bahwa semakin banyak keluarga yang berpenghasilan ganda, perempuan merasakan ketidakadilan dalam pembagian perannya (Kim, 1997; Saso, 1990 dalam Vanitha & Venkatachalam, 2018: 6507).

Dengan beban peran tersebut, sangat rentan terjadi konflik serta ketegangan dalam rumah tangga, hal ini dapat berdampak pada ketidakharmonisan keluarga. Tentunya pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri dapat meminimalkan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Keharmonisan keluarga ditandai oleh perasaan bahagia dan berkurangnya konflik. Dari sanalah pembagian peran sangat berdampak bagi keharmonisan keluarga.

Selain masalah beban ganda pada perempuan, terdapat pula permasalahan terkait ketidakmampuan dalam menyeimbangkan antara peran yang satu dengan peran yang lainnya. Kesulitan perempuan dalam menyeimbangkan peran antara peran domestik dengan peran publik disebabkan karena partisipasi laki-laki yang terbatas dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak (Martinez, dkk., 2011: 813).

Dalam *dual earner family*, keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan tuntutan keluarga menyebabkan orang tua merasa bersalah karena tidak terpenuhinya tanggung jawab mereka dalam pengasuhan anak. Secara spesifik, perempuan yang mengaktualisasikan dirinya di sektor publik harus mengikuti budaya tradisional yang mengharuskannya untuk memprioritaskan keluarga. Di sisi lain, bagi laki-laki pergeseran peran terutama dalam pembagian peran suami yang lebih terlibat dalam pengurusan rumah tangga dan perawatan anak, yang mana tidak sesuai dengan peran pencari nafkah yang lebih tradisional (Martinez, dkk., 2011: 813).

Kantor Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan salah satu tempat yang sebagian besar pegawainya memiliki pasangan yang berpenghasilan ganda. Terlebih di Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bandung yang mana hampir seluruh pegawai memiliki pasangan yang berpenghasilan ganda, sisanya ada yang belum menikah dan ada pegawai yang pasangannya tidak bekerja. Hal ini membuktikan bahwa model keluarga *dual earner family* sudah bukan hal yang baru lagi.

Dengan bekerjanya suami dan istri, terlebih pekerja kantoran yang memiliki jadwal kerja yang terstruktur dan sistematis, dapat mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan waktu antara pekerjaan publik dengan pekerjaan rumah tangga. Beban peran antara suami dan istri yang bekerja sama besarnya, karena itulah pembagian peran pada model *dual earner family* di Kantor Sub Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Bandung diperlukan untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga.

Pembagian peran gender dalam keluarga sebetulnya sudah diteliti oleh seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry bernama Erniha, beliau menyatakan bahwa dalam peran domestik, perempuan cenderung mendominasi dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Dalam peran sosial (kemasyarakatan), diskriminasi gender dialami oleh perempuan. Hal ini terlihat ketika rapat desa, yang datang hanya laki-laki saja sedangkan perempuan hanya mendengarkan dan tidak dapat menyuarakan pendapatnya, bahkan perempuan ditugaskan untuk menyajikan makanan.

Penelitian tersebut membahas pembagian peran gender secara sederhana, hanya pembagian peran pada keluarga yang berada di pedesaan secara umum saja bukan berdasarkan peran gender pada *dual earner family* atau keluarga yang memiliki penghasilan ganda (suami dan istri sama-sama bekerja). Penelitian tersebut juga tidak membahas dampak dari pembagian peran tersebut bagi keharmonisan keluarga.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pembagian peran dalam keluarga dan dampaknya bagi keharmonisan keluarga. Penelitian ini peneliti angkat dengan judul penelitian: **PEMBAGIAN PERAN GENDER DALAM *DUAL EARNER FAMILY* DAN DAMPAKNYA BAGI KEHARMONISAN KELUARGA (Studi pada Keluarga Berpenghasilan Ganda di Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bandung).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Industrialisasi semakin meningkat pesat di Indonesia membuka peluang bagi perempuan untuk dapat bekerja di sektor publik.
2. Meningkatnya keterampilan, potensi dan pendidikan perempuan kiranya sudah mengubah pola pikir mereka terkait gender, hal tersebut membuat perempuan dapat mengekspresikan dirinya pada berbagai bidang publik seperti ekonomi, politik, sosial, budaya maupun kesehatan.
3. Banyak perempuan yang telah menikah dan berkeluarga memilih untuk bekerja di sektor publik.
4. Saat ini, terdapat berbagai bentuk keluarga modern, salah satunya yaitu tipe *dual earner family*. Pada tipe *dual earner family*, keluarga mendapatkan dua penghasilan ganda yaitu dari suami dan istri, atau dengan kata lain suami

dan istri sama-sama bekerja. Dalam *dual earner family*, terjadi pergeseran peran, yang semula perempuan hanya berperan di area domestik saja dan laki-laki di area publik saja kini mulai mengalami perubahan.

5. Pada tipe *dual earner family* diperlukan adanya pembagian peran gender secara seimbang dan berkeadilan karena beban peran antara suami dan istri sama besarnya. Dengan pembagian peran gender yang seimbang dan berkeadilan maka dapat tercipta keharmonisan dalam keluarga.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dibahas adalah bagaimana pembagian peran gender dalam *dual earner family* dan dampaknya bagi keharmonisan keluarga, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian peran gender dalam *dual earner family* di Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bandung?
2. Bagaimana dampak pembagian peran gender dalam *dual earner family* bagi keharmonisan keluarga di Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembagian peran gender dalam *dual earner family* di Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dampak pembagian peran gender dalam *dual earner family* bagi keharmonisan keluarga di Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dalam penelitian ini secara akademis maupun praktis, di antaranya:

1. Secara Akademis (Teoritis)

Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam bidang ilmu-ilmu sosial, khususnya berkenaan dengan analisis pembagian peran gender serta dampaknya bagi keharmonisan keluarga yang termasuk ke dalam teori sosiologi gender. Dengan penelitian ini, peneliti juga berharap dapat menambah pemahaman dan pengetahuan terkait pembagian peran berwawasan kesetaraan gender untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini, peneliti berharap bisa memberikan gambaran kepada masyarakat serta lembaga pemerintahan terkait pentingnya pembagian peran gender yang berkeadilan dalam keluarga agar berdampak positif bagi keharmonisan keluarga, khususnya pada *dual earner family*.

1.6 Kerangka Penelitian

Teori struktural fungsional Talcott Parsons menjelaskan bahwa kedudukan seseorang dalam keluarga memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Dalam teori ini, penentuan peran setiap anggota keluarga dilakukan oleh laki-laki sebagai kepala keluarga. Seorang laki-laki secara hierarki memiliki wewenang tertinggi dalam mengambil keputusan-keputusan keluarga. Suatu keluarga dapat mencapai keseimbangan apabila fungsi-fungsi dalam keluarga dapat berjalan dengan baik. Artinya, setiap anggota keluarga mengetahui dan mengerjakan fungsi dan perannya sesuai dengan status atau kedudukannya masing-masing.

Dewasa ini, banyak ditemui bentuk keluarga *dual earner family* atau keluarga berpenghasilan ganda karena suami dan istri sama-sama bekerja dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya. Seiring dengan tingginya partisipasi perempuan di sektor publik, hal ini mempengaruhi struktur peran di dalam keluarga yang semula peran suami pada sektor publik saja dan peran istri pada sektor domestik saja kini berubah karena suami dan istri sama-sama

bekerja. Dengan adanya perubahan dalam struktur peran keluarga maka menyebabkan suami sebagai kepala keluarga diharapkan mengambil keputusan dalam pembagian peran.

Pembagian peran dalam *dual earner family* dibagi ke dalam tiga peran, yakni pembagian peran domestik, peran publik serta peran sosial. Peran domestik meliputi aktivitas reproduktif yang kegiatannya berada di dalam rumah, seperti mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus anak, memasak dan sebagainya. Peran publik meliputi aktivitas produktif yang kegiatannya berada di luar rumah serta mendapatkan penghasilan, dalam penelitian ini informan bekerja sebagai pegawai, baik PNS maupun Non PNS dan memiliki pasangan yang bekerja baik di sektor formal maupun informal. Peran sosial meliputi kegiatan kemasyarakatan yang kegiatannya untuk memelihara kebersamaan masyarakat, seperti gotong royong, arisan, pengajian dan sebagainya.

Keharmonisan keluarga merupakan dampak dari penerapan pembagian peran gender dalam keluarga. Pembagian peran yang dilandasi oleh kesetaraan dan keadilan gender merupakan langkah efektif yang dapat diterapkan pada lingkungan rumah tangga untuk mencapai keharmonisan keluarga. Keharmonisan ini dibutuhkan oleh keluarga untuk menjaga kestabilan dalam rumah tangga. Dengan adanya pembagian peran yang seimbang diharapkan dapat berdampak positif bagi keharmonisan keluarga.

Kemudian berdasarkan alur pemikiran di atas, untuk melihat lebih jelas terkait alur pemikiran penelitian dapat dilihat gambar kerangka pemikiran berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

